

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan imigran merupakan salah satu hal yang bersifat lazim dihadapi oleh negara-negara maju. Persoalan ini pada umumnya disebabkan oleh “*push and pull factors*” berupa keinginan untuk mendapatkan perbaikan secara sosio-ekonomi atau rasa aman dari persekusi secara politik (*push*) maupun daya tarik secara ekonomi dan politik di negara tujuan (*pull*)(S. Castles; M.J. Miller 1998). Arus imigran dari suatu negara ke negara lainnya biasanya dimulai dari diadakannya hubungan antara kedua negara misalnya melalui kolonialisme dan pendudukan, intervensi militer dan politik, maupun permintaan dan pengiriman tenaga kerja asing.

Sejak pertama kali Amerika Serikat berdiri ditahun 1776, Amerika Serikat telah menjadi magnet bagi para imigran. Mulai dari ketika Amerika Serikat di era *civil war* hingga di saat era perang dunia ke-1 dan 2(History, 2018). Puncak dari meningkatnya arus imigran yang masuk ke Amerika Serikat dimulai sejak tahun 1960an, dengan seperlima dari imigran dunia tinggal disana pada 2017. Data dari *American Community Survey* (ACS) menunjukkan bahwa pada 2017, total dari imigran yang terdaftar dan juga anak anak mereka yang dilahirkan di Amerika Serikat, mencapai 86,4 juta orang atau 27 persen dari total populasi dari negara tersebut. Sebelumnya pada 2016, lebih dari 43,7 juta imigran telah bermukim di AS, atau sekitar 13,5 persen dari total populasi dari Amerika Serikat(States 2017).

Dengan jumlah yang begitu besar bagi populasi masyarakat AS, imigran dianggap bisa menjadi aset berharga dan bahkan bisa menjadi tantangan besar bagi Amerika Serikat sendiri, dikarenakan mempunyai dampak yang signifikan terhadap ekonomi negara, keamanan negara maupun dengan peran Amerika Serikat mengenai perlindungan humaniter di mata Internasional. Hal ini mengakibatkan kebijakan apapun mengenai kaum imigran, menjadi sorotan utama bagi mayoritas populasi di Amerika Serikat maupun di mata Internasional.

Kebijakan mengenai imigran pula menjadi salah satu alat politik untuk mendapatkan kekuasaan dan dukungan dari masyarakat Amerika Serikat, dikarenakan semakin majemuknya suatu masyarakat maka akan terjadi gesekan antara mayoritas dan juga minoritas yang diakibatkan ketidaksesuaian mengenai cara pandang suatu kelompok masyarakat. Selain itu Imigran menyangkut secara langsung terhadap komunitas masyarakat Amerika Serikat, yang berdampak terhadap *public opinion* yang dapat diambil golongan tertentu untuk mendapatkan kekuasaan.

Sebagai contoh ketika Presiden Barrack Obama memimpin sebagai penerus tongkat kepemimpinan Amerika Serikat pasca era Bush berakhir. Presiden Obama membuat beberapa kebijakan seperti *Deferred Action for Parents of Americans* (DAPA) dan *Deferred Action for Childhood Arrivals* (DACA+), yang garis besar dari kebijakan tersebut adalah pemberian amnesti bagi para imigran gelap yang sesuai dengan kategori tertentu serta perlindungan imigran gelap dari stigma sebagian masyarakat sebagai ancaman bagi keamanan nasional Amerika Serikat, dan hal ini juga didasari dari

tujuan Barrack Obama dalam memperbaiki citra Amerika Serikat di dunia internasional. (VOA 2016).

Hal ini sangat berbeda ketika Presiden Donald Trump memimpin. Presiden Donald Trump sendiri mengeluarkan kebijakan *zero tolerance*, yang mana didalam kebijakan tersebut Presiden Trump menginginkan adanya tindakan tegas bagi para imigran yang masuk ke Amerika Serikat. Sebagai bentuk rangkaian kebijakan tersebut Presiden Trump menghentikan program *Deferred Action for Parents of Americans* (DAPA) dan *Deferred Action for Childhood Arrivals* (DACA+). Selain itu Presiden Trump mengeluarkan kebijakan larangan masuk bagi imigran dari delapan negara dengan mayoritas penduduk Muslim dan merencanakan proyek pembangunan dinding pembatas di sepanjang jalur perbatasan darat Amerika Serikat dan Meksiko (Kopan 2017).

Berbagai reaksi dan respon-pun bermunculan baik dari aktor-aktor politik Amerika Serikat itu sendiri dan dari dunia internasional. Seperti dari partai Demokrat yang menolak adanya kebijakan tersebut, dimana partai Demokrat merasa bahwa kebijakan *zero tolerance* dan pembangunan dinding pembatas tersebut hanya akan merugikan Amerika Serikat serta dirasa masih terdapat hal-hal yang lebih pantas untuk diangkat ketimbang membangun dinding pembatas tersebut (Times 2019).

Selain respon penolakan yang muncul dari partai oposisi, terdapat pula respon penolakan dari sebagian kelompok masyarakat Amerika Serikat itu sendiri, terutama dari warga masyarakat yang tinggal di negara bagian yang dekat dengan lokasi pembangunan.

Masyarakat setempat merasa bahwasannya pembangunan dinding tersebut selain hanya menghamburkan uang negara namun juga justru membuat masyarakat merasa terisolasi di wilayahnya sendiri. (Kull 2019).

B. Rumusan Masalah

Mengapa Donald Trump mengeluarkan kebijakan *zero tolerance* terhadap imigran di Amerika Serikat.

C. Kerangka Teori

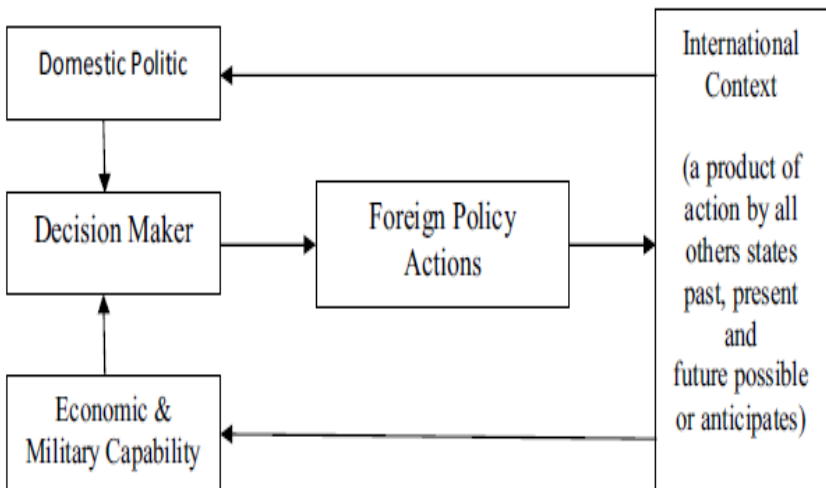
Dalam mempermudah penulis melakukan analisis terkait pembuatan kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat di era Presiden Donald J Trump terkait dengan isu ‘imigran’ maka disini penulis akan menggunakan teori Pembuatan Kebijakan Luar Negeri yang dipopulerkan oleh *William D. Coplin*. Berdasarkan buku yang berjudul *Introduction of International Politic*, dimana dijelaskan bahwa terdapat serangkaian proses-proses yang diperlukan dalam pembuatan sebuah keputusan luar negeri serta terdapat hal-hal yang dapat mempengaruhi sebuah pengambilan keputusan luar negeri. Lebih lanjut Coplin menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri suatu negara merupakan hasil dari tiga konsiderasi yang memengaruhi para aktor pembuat kebijakan. Ketiga konsiderasi tersebut yaitu; pertama, kondisi politik dalam negeri, kedua adalah kapabilitas ekonomi dan militer, dan yang terakhir adalah konteks

internasional, yaitu posisi khusus suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain (Coplin 2003).

Gambar 1.1

Model Proses Pengambilan Keputusan Luar Negeri (Coplin 2003)

Sumber: repository.umy.ac.id



a) Politik Dalam Negeri

Menurut penjelasan William D. Coplin, politik dalam negeri muncul akibat dari adanya interaksi yang melibatkan aktor-aktor terkait di suatu negara. Interaksi diantara aktor-aktor tersebut melahirkan sebuah kebijakan yang mana kebijakan tersebut nantinya akan mencerminkan kondisi politik dalam negeri suatu negara. Lantas bagaimana politik dalam negeri suatu negara mempengaruhi arah kebijakan luar negeri suatu negara? Dijelaskan oleh Coplin bahwasannya, ada interaksi yang dilakukan oleh aktor pembuat kebijakan luar negeri dan aktor pembuat kebijakan dalam negeri yang didalamnya terdapat proses saling mempengaruhi arah kebijakan yang disebut Coplin dengan "*policy influencer*". Coplin menambahkan bahwasanya terdapat hubungan timbal-balik yang terjadi antara para pengambil keputusan dengan "*policy influencer*", dan hal ini sangatlah diperlukan oleh sebuah rezim demi menjaga legitimasinya. Selain itu hal ini akan selalu terjadi dan muncul di segala sistem pemerintahan baik itu demokrasi maupun autokrasi.

Penjelasan William D. Coplin mengenai kondisi politik dalam negeri tersebut diperkuat oleh argumen yang dikemukakan oleh David Easton terkait dengan sistem politik. Easton mengatakan bahwa kondisi politik dalam negeri merupakan gambaran akan tuntutan yang muncul dari masyarakat secara umum di negara tersebut, yang sering disebut sebagai *input* (Miriam Budiardjo 2008). *Input* tersebut akan memengaruhi proses pembuatan kebijakan politik, baik dalam lembaga legislatif maupun eksekutif dan selanjutnya akan

membentuk kondisi dalam negeri. Sehingga, para pembuat keputusan dapat mengacu pada kondisi dalam negeri, apakah dukungan dan tuntutan dari masyarakat sejalan dengan kebijakan yang dirumuskan di lembaga politik.

Dari sisi kepentingan nasional, dimana Presiden Trump ingin meningkatkan perekonomian dan kemakmuran bagi masyarakat Amerika Serikat. Hal ini didasari dari anggapan Presiden Trump terkait menurunnya perekonomian Amerika Serikat di era Presiden Obama yang terlalu fokus membantu dunia internasional yang cenderung merugikan masyarakat Amerika Serikat itu sendiri. Presiden Trump merasa bahwa adanya imigran di Amerika Serikat dapat mempengaruhi perekonomian Amerika Serikat terutama bagi masyarakat Amerika itu sendiri, dan hal ini menjadi salah satu faktor meningkatnya angka pengangguran di Amerika Serikat. Presiden Trump merasa bahwa meningkatnya angka pengangguran di Amerika Serikat di akibatkan dari melonjaknya angka imigran yang masuk ke Amerika dan hal tersebut membuat semakin minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia. (Michel 2019).

b) Kapabilitas Ekonomi dan Militer

Coplin menjelaskan bahwasannya analisa tentang pengaruh ekonomi dan militer dalam pengambilan keputusan berangkat dari perilaku kerajaan-kerajaan di Eropa pada abad pertengahan. Dalam hal ini, terdapat korelasi yang sangat erat akan ekonomi dan militer, dimana ketika faktor militer meningkat maka hal tersebut

dapat meningkatkan kemakmuran secara ekonomi kerajaan terkait (Coplin 2003).

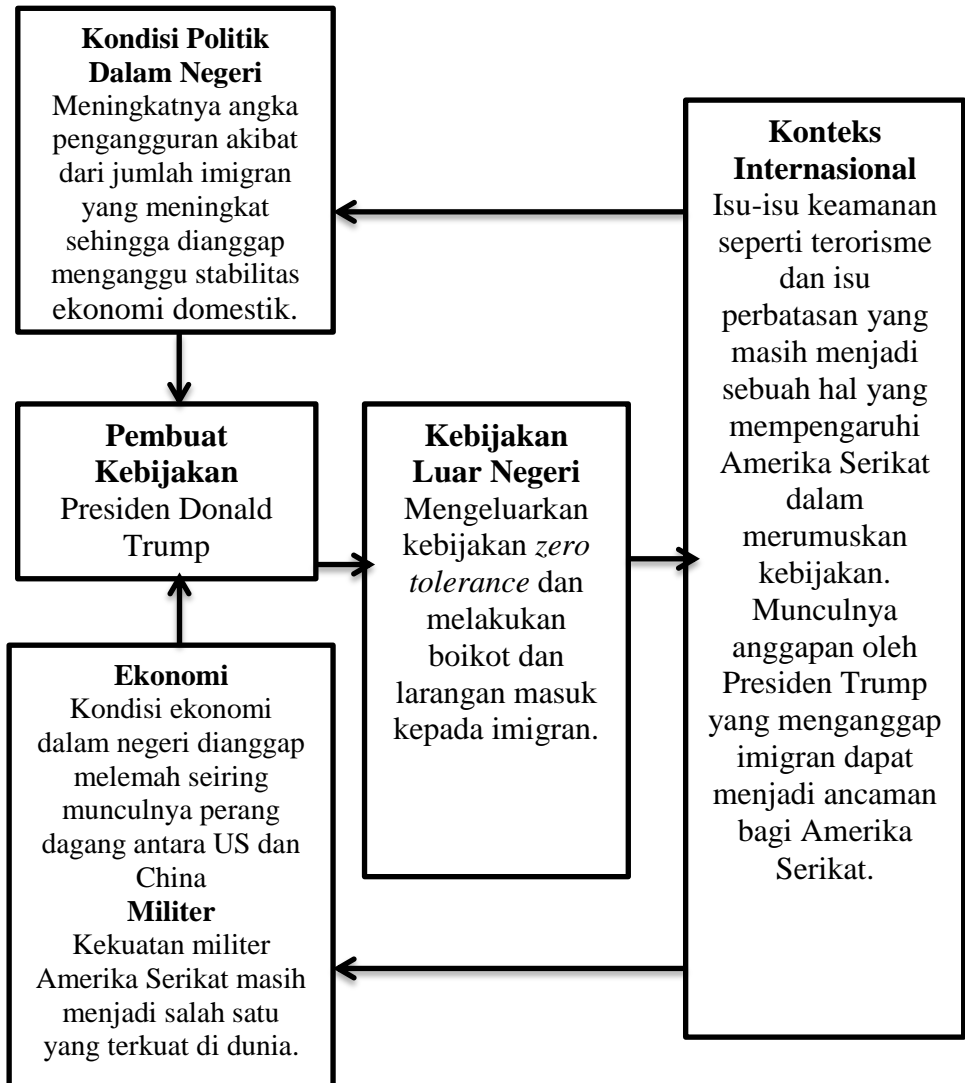
Berbicara terkait faktor ekonomi dan militer, Amerika Serikat masih menjadi salah satu negara dengan kekuatan militer terkuat di dunia. Terbukti dari banyaknya alutsista serta personil militer yang dimiliki Amerika Serikat (GFP 2019). Sedangkan dari sisi ekonomi Amerika Serikat masih menjadi salah satu negara dengan ekonomi yang baik di dunia selain Cina (IMF 2018) . Walaupun secara statistik ekonomi Amerika Serikat masih menjadi yang pertama di dunia, namun perkembangan ekonomi negara-negara lain terutama Cina menjadi ke-khawatiran tersendiri bagi Amerika Serikat. Mengacu ke hal tersebut, Presiden Trump berusaha menjaga stabilitas perekonomian Amerika Serikat baik secara lingkup domestik maupun lingkup internasional,

c) Konteks Internasional

Mengacu ke argumen Hans J Morgenthau bahwa setiap negara memiliki hubungan dengan lingkungan internasional yang ditetapkannya sebagai seperangkat kepentingan nasional yang objektif (Coplin 2003). Konteks internasional ini dapat menjelaskan mengenai mengapa sebuah negara berperilaku tertentu terhadap negara lainnya, dan dapat disimpulkan bahwa konteks internasional dapat memengaruhi perilaku sebuah negara di dunia internasional.

Amerika Serikat menganggap bahwa isu mengenai imigran merupakan sebuah bentuk ancaman bagi

Amerika Serikat. Amerika Serikat merasa imigran merupakan salah satu bentuk ancaman bagi keamanan negara Amerika Serikat itu sendiri. Presiden Donald Trump dalam hal ini menilai aksi-aksi terorisme dan kriminalitas yang terjadi di Amerika Serikat merupakan bentuk nyata ancaman yang ditimbulkan dari masuknya imigran ini. Amerika Serikat sendiri jika kita melihatnya dari perspektif dunia internasional merupakan salah satu negara yang sangat keras terhadap hal-hal yang menyangkut terorisme, terlebih setelah tragedi 9/11 yang menimpa negara tersebut. Terjadi nya beberapa serangkaian aksi terorisme yang terjadi di beberapa negara dan Amerika Serikat yang di klaim Amerika Serikat dilakukan oleh para kaum imigran pun menjadi sebuah argument sendiri bagi Presiden Trump dalam merancang kebijakan Amerika Serikat terkait imigran ini (Eoyang 2019).



Gambar 1.2
Aplikasi Teori Model Proses Pengambilan Keputusan
Luar Negeri
(William D. Coplin)

D. Hipotesa

Alasan mengapa Presiden Donald mengeluarkan kebijakan *zero tolerance* terhadap imigran di Amerika Serikat karena sebagai berikut:

- 1) Politik dalam negeri Amerika Serikat yang ingin melindungi tenaga kerja Amerika Serikat.
- 2) Isu keamanan yang muncul dan berkembang di dunia internasional yang mempengaruhi pengambilan kebijakan Amerika Serikat.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan karya tulis ini adalah untuk:

1. Menjelaskan mengenai mengapa Presiden Trump mengeluarkan kebijakan *zero tolerance* yang ditujukan bagi para imigran.

F. Metodologi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, saya menggunakan metodologi penelitian berupa kajian data pustaka dari berbagai sumber seperti buku-buku, dokumen-dokumen, laporan-laporan, surat kabar, internet, dan lain sebagainya yang kredibel dan dapat dipertanggung jawabkan. Dimana metodologi penelitian yang saya gunakan dapat disebut sebagai metodologi penelitian yang menggunakan data sekunder sebagai referensi.

G. Jangkauan Penelitian

Batasan penelitian digunakan untuk mencegah dan menghindari melebarnya pembahasan penelitian. Dikarenakan penulis ingin menjelaskan mengenai alasan pemerintah Amerika Serikat dibawah kepemimpinan Presiden Trump mengeluarkan kebijakan *zero tolerance*, maka penulis membatasi penelelitian di kurun waktu dari tahun 2016-2019. Namun tidak menutup kemungkinan akan menggunakan data-data di luar kurun waktu yang ada sebagai alat bantu penulis dalam mengkaji penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

BAB I : berisi pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, implementasi teori, hipotesa, tujuan penelitian, metode penelitian, batasan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : berisi mengenai dinamika politik luar negeri Amerika Serikat terhadap imigran.

BAB III : berisi penjelasan mengenai kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap imigran di masa Presiden Trump.

BAB IV : berisi penjelasan mengenai motif kebijakan luar negeri Donald Trump terhadap imigran di Amerika Serikat.

BAB V : berisi kesimpulan dari penelitian.